

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Rencana kerja tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2023.

Dalam Upaya Pengendalian Penduduk dan Pencapaian Keluarga Berencana yang optimal Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Malili, 04 April 2022
Kepala DPPKB Luwu Timur



Dra. H. Puspawati
Pangkat. Pembina
Nip. 19670308 199402 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan perencanaan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen rencana pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju utara di propinsi Sulawesi Selatan (Iembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembar an Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke dalam program/kegiatan tahunan 2023
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi tentang:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Standar Pelayanan Minimal (SPM) /Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu - isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja Tahun 2021. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur meliputi realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan, realisasi program/kegiatan yang memenuhi target yang direncanakan dan realisasi program dan kegiatan yang melebihi target yang direncanakan.

Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Luwu Timur. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur s/d Tahun 2021 :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra s.d Tahun 2021 Kab. Luwu Timur

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2022 (n-1)	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
2.08.2.08.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100 persen							
2.08.2.08.01.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda	1600 surat	0	800	800	100	0	0	0
2.08.2.08.01.01.07	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sda dan listrik yang terbayarkan	240 rekening	48	48	48	100	48	48	100
2.08.2.08.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	1 orang	1	1	1	100	1	1	100
2.08.2.08.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 Jenis	3	3	3	100	3	3	100
2.08.2.08.01.01.12	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	80 Jenis	0	0	0	0	0	0	0

2.08.2.08.01.01.15	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.01.18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik instalasi listrik bangunan yang disediakan	2 unit	2	2	2	100	2	2	100
2.08.2.08.01.01.19	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	300 eksamplar	60	60	60	100	60	60	100
2.08.2.08.01.01.22	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum yang disediakan	4652 kotak	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.01.23	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi keluar daerah	392 kali	134	84	84	100	84	84	100
2.08.2.08.01.01.24	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	16 orang	16	16	16	100	16	16	100
2.08.2.08.01.02.03	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulanan yang disusun	20 Dokumen	4	4	4	100	4	4	100
2.08.2.08.01.02.05	Kunjungan kerja dalam daerah	Frekuensi kunjungan dalam daerah	1880 kunjungan	346	300	300	100	300	350	116
2.08.2.08.01.02.07	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	95%							
2.08.2.08.01.02.12	Pembangunan Pagar Kantor	Jumlah bangunan kantor yang dibangun	1 unit	0	0	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.02.22	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	103 unit	31	31	31	100	31	31	100
2.08.2.08.01.02.24	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	69 unit	12	9	20	222	9	9	100
2.08.2.08.01.03	Pembangunan Taman, Lapangan/Fasilitas Parkir	Luas taman, lapangan parkir yang dibangun	1 keg	0	0	0	0	0	0	0

2.08.2.08.01.03.05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2	2	2	100	2	2	100
2.08.2.08.01.05	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	110 unit	48	48	79	164	79	79	100
2.08.2.08.01.06	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan hari-hari tertentu	90%							
2.08.2.08.01.06.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	33 orang	32	33	0	0	0	0	0
2.08.2.08.01.08	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	95%							
2.08.2.08.01.08.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	20 dokumen	4	6	6	100	4	4	100
2.08.2.08.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	51 orang							
2.08.2.08.01.15.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan	51 orang	5	15	15	100	15	15	100
2.08.2.08.01.15.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	90%							
2.08.2.08.01.15.07	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun	8 dokumen	3	1	1	100	3	3	100

2.08.2.08.01.15.08	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan akhir tahun	jumlah dokumen laporan keuangan semester dan akhir tahun yang disusun	6 dokumen	1	3	3	100	3	3	100
2.08.2.08.01.15.09	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	Persentase jumlah kelompok UPPKS yang dibina	100 persen							
2.08.2.08.01.15.10	Identifikasi dan fasilitasi pembentukan kelompok UPPKS	jumlah kelompok yang teridentifikasi dan terfasilitasi	4 kelompok	0	2	2	100	2	2	100
2.08.2.08.01.17	Pembinaan dan pengembangan UPPKS	jumlah kelompok yang dibina	18 kelompok	0	15	15	100	15	15	100
2.08.2.08.01.17.04	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	32,8 Persen;100 Persen							
2.08.2.08.01.18	Pelayanan KB medis operasi	jumlah akseptor KB metode operasi (wanita dan pria) yang terlayani	270 orang	40	30	30	100	30	30	100
2.08.2.08.01.18.02	pengendalian dan distribusi alat kontrasepsi	jumlah klinik yang mendapatkan distribusi alokon	19 klinik	0	19	19	100	19	19	100
2.08.2.08.01.18.03	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per-keluarga; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need); Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	2,75 orang;13,15 Persen;83,25 Persen							
2.08.2.08.01.18.04	Pelayanan KB daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan	jumlah akseptor yang terlayani	1000 orang	149	175	175	100	175	175	100

2.08.2.08.01.18.05	Operasional penyuluh KB	jumlah balai yang mendapat dukungan operasional pembiayaan	12 balai	11	12	12	100	12	12	100
2.08.2.08.01.20	Pelayanan KB bagi Masyarakat	Jumlah akseptor baru yang dilayani	6.405 Orang	4350	6405	4834	75.47	6405	5002	78.09
		Jumlah akseptor aktif yang dilayani	34.065 Orang	33396	33284	33227	99.82	33284	32503	97.65
2.08.2.08.01.23	Program Pembinaan Ketahanan Keluarga	Persentase jumlah kelompok yang dibina	100 Persen							
2.08.2.08.01.23.01	Peningkatan Pembinaan Bina Keluarga Balita	Jumlah kelompok BKB yang dibina	55 kelompok	55	11	11	100	11	11	100
	Peningkatan Pembinaan Keluarga Remaja	jumlah kelompok BKR yang dibina	55 kelompok	55	11	11	100	11	11	100
	peningkatan pembinaan keluarga lansia	jumlah kelompok BKL yang dibina	55 kelompok	55	11	11	100	11	11	100
	apresiasi hari keluarga nasional	jumlah kategori lomba	11 kategori	11	11	11	100	11	11	100
	pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas PIK KRR	jumlah kelompok PIK Remaja jalur pendidikan yang diberikan pelatihan	36 kelompok	22	34	34	100	34	34	100
		JUmlah kelompok PIK Remaja jalur masyarakat yang diberikan pelatihan	2 kelompok	5	1	1	100	1	1	100
	Program Peningkatan Advokasi KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk; Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	9,09 Persen;13,15 Persen							
	Pendewasaan usia perkawinan	Jumlah sekolah tingkat SMP DAN SMA yang mendapatkan penyuluhan	12 sekolah	12	12	12	100	12	12	100

	Peningkatan kualitas pelayanan KIE	Jumlah peserta pelatihan	440 orang	484	220	220	99.18	220	220	220
	Sosialisasi Kebijakan Dampak Kependudukan	jumlah peserta sosialisasi	24 orang	0	24	24	100	24	24	100
	Workshop Advokasi KIE KKBPK	jumlah peserta workshop	120 orang	0	60	60	100	0	0	0
	Program Pembinaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4 OPD							
	Pengelolaan data dan informasi keluarga	jumlah dusun yang didata	491 dusun	491	491	491	100	491	491	100
	Grand Design pembangunan keluarga	jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi perumusan kebijakan dan pengelolaan program	Jumlah peserta yg mengikuti koordinasi perumusan kebijakan dan pengelolaan program	200 orang	200	200	200	100	200	200	100
	Program Optimalisasi Pendayagunaan Tenaga PLKB	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	100 Persen							
	Pembinaan dan pengawasan kinerja PLKB	jumlah PLKB yang di bina	116 orang	0	115	115	0	115	114	99.13

	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat	Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB; Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	41,17 Persen;100 Persen							
	Operasional kelompok masyarakat peduli KB	jumlah PPKBD yang diberdayakan	127 orang	127	127	127	100	127	127	100
		jumlah sub PPKBD yang diberdayakan	454 orang	342	491	491	100	491	491	100
	Fasilitasi pembinaan kampung KB	jumlah kampung kb yang dibina	36 kampung KB	11	24	24	100	24	24	100

Update Data Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra s.d Tahun 2021

2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (2021)	Target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Realisasi Capaian	Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2026	2021	
1	Meningkatkan Penduduk yang Berkualitas		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1.88	1.79	1.7	1.63	1.57	1.57	1.99	
2		Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	-	2.25	2.60	2.53	2.47	2.40	2.40	2.79	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	-	10.96	35.05	35.53	36.22	36.32	36.33	35.38	
3	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	-	70	70	75	80	80	80		
			Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	-	100	100	100	100	100	100	99.04	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur 2021-2026 yang berjumlah 3 (tiga) indicator adalah indicator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini menjadi tolak ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu Timur. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2022 bahwa dari Tiga indicator di atas, rata-rata semuanya mencapai target.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendapat tempat yang cukup penting dalam pembangunan, ini dapat dilihat dari arah prioritas pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Seiring kondisi tersebut isu – isu di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga berjalan dinamis. Isu pada kondisi daerah Kabupaten Luwu timur :

a. Pada Bidang pengendalian penduduk Yaitu :

1. Belum optimalnya Advokasi dan KIE Operasional di lapangan;
2. Belum optimalnya Pendataan Keluarga yang akurat

3. Belum Optimalnya pemahaman tentang Pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja.
 4. Belum terpenuhinya tenaga Sub PPKBD di semua dusun yang ada
 5. Belum Optimalnya Keterlibatan Lintas Sektoral yang lain di Kampung KB
 6. Masih Terdapat Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang belum memahami Tugas dan Fungsinya dengan baik.
- b. Pada Bidang Keluarga Sejahtera :
1. Belum optimalnya pembinaan oleh kelompok Tribina;
 2. Belum optimalnya pengetahuan kader Kelompok Kegiatan (POKTAN) tentang tugas-tugasnya.
 3. Masih Kurangnya Kelompok UPPKS terbentuk di lingkungan masyarakat
 4. Masih kurangnya keaktifan kader-kader Kelompok Kegiatan (POKTAN).
- c. Pada Bidang Keluarga Berencana :
1. Belum Optimalnya Pemahaman Masyarakat tentang Penting Program Keluarga Berencana
 2. Masih Kurangnya Pemahaman atau Pengetahuan Masyarakat Tentang Mamfaat Penggunaan Alat dan obat Kontrasepsi
 3. Masih terdapat Pemahaman keliru atau informasi yang salah tentang Efek Samping Alat dan obat Kontrasepsi di Masyarakat
 4. Masih kurangnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) , yang dalam hal ini hanya menunggu drop dari perwakilan BKKBN provinsi Sulawesi Selatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)

Dalam melakukan review terhadap rancangan awal rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 dilakukan perbandingan antara perumusan hasil identifikasi kebutuhan program dengan dan kegiatan berdasarkan analisis yang telah mempertimbangkan target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dan juga tingkat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program / kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program / kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan kajian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupa rancangan awal RKPD.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

Kode	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 Persen	2.888.360.985,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		100 Persen	2.977.568.979,00
XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 Persen	48.610.000,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100 Persen	48.610.000,00
XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	DPPKB	3 Dokumen	17.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	DPPKB	3 Dokumen	17.000.000,00
XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	DPPKB	2 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	DPPKB	2 Dokumen	3.000.000,00
XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DKA-PD	DPPKB	2 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DKA-PD	DPPKB	2 Dokumen	3.000.000,00
XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	DPPKB	8 Dokumen	25.610.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	DPPKB	8 Dokumen	25.610.000,00

RENCANA KERJA (RENJA) DPPKB KAB. LUWU TIMUR 2023

X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100 Persen	2.136.037.985,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu		100 Persen	2.136.234.579,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN	DPPKB	18 orang	2.106.677.985,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN	DPPKB	18 orang	2.106.874.579,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	DPPKB	10 Dokumen	29.360.000,00	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	DPPKB	10 Dokumen	29.360.000,00
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100 Persen	16.290.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar		100 Persen	16.290.000,00
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	DPPKB	4 dokumen	16.290.000,00	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	DPPKB	4 dokumen	16.290.000,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100 Persen	41.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pegawai PD yang dilayani		100 Persen	41.000.000,00
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	DPPKB	8 Dokumen	25.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	DPPKB	8 Dokumen	25.000.000,00
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	DPPKB	2 Orang	16.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Mengikuti Bimtek yang mampu implementasikan peraturan perundangan	DPPKB	2 Orang	16.000.000,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100 Persen	428.543.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		100 Persen	455.380.400,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	DPPKB	2 jenis	3.250.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	DPPKB	2 jenis	3.250.000,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	DPPKB	217 Jenis	5.800.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	DPPKB	217 Jenis	5.800.000,00

RENCANA KERJA (RENJA) DPPKB KAB. LUWU TIMUR 2023

X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	DPPKB	1 Paket	7.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan dan digandakan	DPPKB	1 Paket	7.500.000,00
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	DPPKB	60 exemplar	6.120.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah exp bacaan dan perundangan disediakan	DPPKB	60 exemplar	6.120.000,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	DPPKB	260 Orang	9.100.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	DPPKB	260 Orang	9.100.000,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	DPPKB	389 Laporan	396.773.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang terselenggara	DPPKB	389 Laporan	423.610.400,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 Persen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100 Persen	62.174.000,00
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	DPPKB	2 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang diadakan	DPPKB	2 unit	-
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	DPPKB	2 unit	-	Pengadaan Meubel	Jumlah mebel yang diadakan	DPPKB	2 unit	-
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	DPPKB	2 unit	-	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	DPPKB	2 unit	62.174.000,00
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	DPPKB	1 unit	-	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	DPPKB	1 unit	-
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100 Persen	103.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		100 Persen	103.000.000,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	DPPKB	600 exemplar	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	DPPKB	600 exemplar	15.000.000,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	DPPKB	48 Rekening	50.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	DPPKB	48 Rekening	50.400.000,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPPKB	3 orang	37.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DPPKB	3 orang	37.600.000,00

RENCANA KERJA (RENJA) DPPKB KAB. LUWU TIMUR 2023

X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 Persen	114.880.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		100 Persen	114.880.000,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPPKB	113 Unit	88.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DPPKB	113 Unit	88.000.000,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	DPPKB	3 Unit	6.880.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	DPPKB	3 Unit	6.880.000,00
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	DPPKB	2 unit	20.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	DPPKB	2 unit	20.000.000,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD)		4 OPD	272.323.146,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD)		4 OPD	272.323.146,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)		2 dokumen	74.940.696,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)		2 dokumen	74.940.696,00
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kebijakan Daerah terhadap KKBPK yang diseraskan	DPPKB	2 dokumen	-	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kebijakan Daerah terhadap KKBPK yang diseraskan	DPPKB	2 dokumen	-

RENCANA KERJA (RENJA) DPPKB KAB. LUWU TIMUR 2023

2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun	DPPKB	1 dokumen	-	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun	DPPKB	1 dokumen	-
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK)	DPPKB	3 dokumen	22.890.696,00	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK)	DPPKB	3 dokumen	22.890.696,00
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi	DPPKB	24 orang	26.700.000,00	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi	DPPKB	24 orang	26.700.000,00
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat	DPPKB	130 orang	25.350.000,00	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat	DPPKB	130 orang	25.350.000,00
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa		100	197.382.450,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa		100	197.382.450,00
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan informasi yang tersedia	DPPKB	3 dokumen	79.782.450,00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan informasi yang tersedia	DPPKB	3 dokumen	79.782.450,00
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian apangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen	DPPKB	1 Dokumen	117.600.000,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian apangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen	DPPKB	1 Dokumen	117.600.000,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)		66.00	4.400.599.294,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)		66.00	4.411.391.300,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar Isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		100	960.072.794,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Masyarakat yang terpapar Isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)		100	960.064.800,00

RENCANA KERJA (RENJA) DPPKB KAB. LUWU TIMUR 2023

2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	DPPKB	40 orang	19.135.000,00	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK	DPPKB	40 orang	19.135.000,00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE	DPPKB	625 orang	59.800.000,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE	DPPKB	625 orang	59.800.000,00
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program	DPPKB	1 Dokumen	70.640.000,00	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program	DPPKB	1 Dokumen	70.640.000,00
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, Minilokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program	DDPKB	1 Dokumen	225.599.994,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, Minilokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program	DDPKB	1 Dokumen	225.592.000,00
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan	DPPKB	12 balai penyuluhan	544.897.800,00	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan	DPPKB	12 balai penyuluhan	544.897.800,00
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DPPKB	1 Laporan	40.000.000,00	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	DPPKB	1 Laporan	40.000.000,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		100	1.839.289.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk		100	1.839.289.000,00

2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina	DPPKB	102 Orang	126.102.000,00	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina	DPPKB	102 Orang	126.102.000,00
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	DPPKB	581 orang	1.713.187.000,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	DPPKB	581 orang	1.713.187.000,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		26.00	1.187.237.500,00	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		26.00	1.198.037.500,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi	DPPKB	21 Faskes	36.660.000,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokasi	DPPKB	21 Faskes	36.660.000,00
2.14.03.2.03.03	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor MKJP yang dilayani	DPPKB	11500 akseptor	665.840.000,00	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Akseptor MKJP yang dilayani	DPPKB	11500 akseptor	676.640.000,00
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang KB yang tersedia	DPPKB	433 unit	475.137.500,00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang KB yang tersedia	DPPKB	433 unit	475.137.500,00
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang dibina	DPPKB	21 Faskes	9.600.000,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang dibina	DPPKB	21 Faskes	9.600.000,00

2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		23	414.000.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		23	414.000.000,00
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Jumlah Stakeholder/Pemangku Jabatan dan Mitra Kerja yang berperan serta aktif	DPPKB	23 StakeHolder	414.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Jumlah Stakeholder/Pemangku Jabatan dan Mitra Kerja yang berperan serta aktif	DPPKB	23 StakeHolder	414.000.000,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Indeks Pembangunan Keluarga		35.02	2.516.709.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Indeks Pembangunan Keluarga		35.02	2.516.709.000,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		71.18	2.500.109.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		71.18	2.500.109.000,00
2.14.04.2.01.01	Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Kelompok yang terbentuk	DPPKB	6 kelompok	19.603.000,00	Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Kelompok yang terbentuk	DPPKB	6 kelompok	19.603.000,00
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok yang diadakan	DPPKB	30 unit	525.200.000,00	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompok yang diadakan	DPPKB	30 unit	525.200.000,00
2.14.04.2.01.03	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	DPPKB	60 kelompok	168.142.000,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan	DPPKB	60 kelompok	168.142.000,00

RENCANA KERJA (RENJA) DPPKB KAB. LUWU TIMUR 2023

2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	DPPKB	4 Kegiatan	1.585.380.000,00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	DPPKB	4 Kegiatan	1.585.380.000,00
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	DPPKB	35 kelompok	184.640.000,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi	DPPKB	35 kelompok	184.640.000,00
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi	DPPKB	40 orang	17.144.000,00	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi	DPPKB	40 orang	17.144.000,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		75.01	16.600.000,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		75.01	16.600.000,00
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	DPPKB	80 Orang	16.600.000,00	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	DPPKB	80 Orang	16.600.000,00
					10.077.992.425,00					10.177.992.425,00

Update Data Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, pokok pikiran anggota DPRD, dan usulan teknokratis. Kemudian usulan – usulan itu diinventarisasi berdasarkan program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan musrenbang tahun 2022, tidak ada usulan-usulan yang ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJM Nasional tercantum tiga agenda Pembangunan Nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan dan menata perekonomian tertuang dalam strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan disertai pemerataan atau *grow with equity*. Strategi ini merupakan pilihan yang paling tepat karena pertumbuhan saja tidak menjamin pemerataan. Pertumbuhan yang dicapai harus memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang telah disusun, terdapat Sejumlah Indikator dan sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Renstra BKKBN Pusat Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun sebagai dokumen Perencanaan yang memuat Tugas dan fungsi, kewenangan, Perkembangan kondisi dan isu strategis, arah kebijakan serta strategi dan kegiatan 5 Tahun kedepan.

Terdapat 6 Indikator Utama Target nasional yang menjadi Sasaran yang ingin dicapai sampai Tahun 2024 Yaitu :

- a. Menurunkan Angka Kelahiran Total / Total Fertilate Rate diangka 2,06%
- b. Meningkatkan Prevalensi Penggunaan Kontrasepsi Modern diangka 56.28%
- c. Menurunkan persentase Kebutuhan BerKB yang Tidak Terpenuhi/Unmet Need diangka 7.17%
- d. Menurunkan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR) diangka 29 %
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) diangka 64.55
- f. Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita Umur 25-49 menjadi 22.1

Pada setiap kegiatan direncanakan harus memperhatikan kondisi dan isu strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah perencanaan berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dapat tepat sasaran dan memberi mamfaat lebih kepada masyarakat Indonesia.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur

Sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan program kegiatannya antara lain :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan SKPD yang efektif, efisien dan akuntabel

2. Meningkatkan penduduk yang berkualitas

Sasaran untuk jangka menengah yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Menurunnya angka kelahiran
2. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

Gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian integral dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan penjabaran program instansi yang telah dicanangkan dan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK dengan kegiatan meliputi :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

- Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA dengan kegiatan meliputi :

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal
- Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK

b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya
- Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB

- Pembinaan Terpadu Kampung KB

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pembentukan kelompok ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS)
 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
 - Advokasi dan Promosi IPK
 - Sosialisasi IPK
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi /UPPKS)
 - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Selain program kegiatan wajib yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat juga program kegiatan penunjang diantaranya :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH dengan kegiatan dan subkegiatan meliputi :
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Meubel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(terlampir)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanakedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung

oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

BAB V PENUTUP

Rencana Anggaran Pada Tahun 2023 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur sebesar Rp. 10.591.563.425,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kerja Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk mencapai target kinerja yang belum tercapai di tahun sebelumnya dan mempertahankan kinerja yang sudah tercapai.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini masih jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PP & KB

Jl. SOEKARNO HATTA, Malili
Kab. Luwu Timur
Telepon (0474) 321489

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																			
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										10,077,992,425				10,197,250,807
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,888,360,985				3,409,109,026
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										48,610,000				90,700,000
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	0 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	100 %	17,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,000,000	
2	14	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	9,500,000	
2	14	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Dokumen 2 dokumen	100 %	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,800,000	
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	8 Dokumen 1 Laporan	100 %	25,610,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	58,400,000	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,136,037,985				2,396,073,946
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	18 orang 18 Orang/bulan	100 %	2,106,677,985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	2,361,573,946	
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	10 Dokumen 2 Laporan	100 %	29,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	34,500,000	
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										16,290,000				21,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	4 dokumen 2 Laporan	100 %	16,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	21,000,000
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								41,000,000				90,505,080	
2	14	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah laporan data adminitrasi kepegawaian yang dimuktahirkan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	8 Dokumen 8 dokumen	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,505,080
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 orang 2 Orang	100 %	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	25,000,000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								428,543,000				447,230,000	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 Jenis 1 Paket	100 %	3,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	3,400,000
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	217 Jenis 1 Paket	100 %	5,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,000,000
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Paket	100 %	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	10,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	5 Dokumen 60 eksample	100 %	6,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,130,000
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Laporan 260 orang	100 %	9,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	6,200,000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	389 Laporan 389 kali	100 %	396,773,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	415,000,000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								103,000,000	113,600,000				
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Laporan 600 surat	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	16,000,000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	1 Laporan 48 rekening	100 %	50,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	60,000,000
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 orang 1 Laporan	100 %	37,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	37,600,000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								114,880,000	140,000,000				
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	113 unit 113 Unit	100 %	88,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	90,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	3 unit	100 %	6,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	15,000,000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	100 %	2 unit	100 %	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	35,000,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								272,323,146	394,700,000				
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								74,940,696	131,700,000				
2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK)	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,01 Anak	1 Laporan 3 sekolah	2 dokumen	22,890,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	55,000,000
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	2,01 Anak	24 Organisasi 24 Orang	2 dokumen	26,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	26,700,000
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Peserta Rapat	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	2,01 Anak	1 Laporan 130 orang	2 dokumen	25,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	30,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								197,382,450	263,000,000				
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rata rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah jenis data keluarga yang ada	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,01 Anak	1 Dokumen 3 Jenis	2 dokumen	79,782,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Rata rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	126,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rata rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Jenis data yang diolah	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,01 Anak	1 Dokumen 3 Jenis	2 dokumen	117,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Rata rata jumlah anak per keluarga	2,01 Anak	126,500,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								4,400,599,294	5,389,454,800				
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								960,072,794	1,045,140,000				
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	40 Organisasi	100 Persen	19,135,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	25,000,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Peserta KIE	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	3 Dokumen 625 orang	100 Persen	59,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	82,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Media Promosi dan KIE yang tersedia	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	1 Dokumen 2 jenis	100 Persen	70,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	70,640,000
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) jumlah peserta rapatkoordinasi dan minilokakarya	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	1 Laporan 300 orang	100 Persen	225,599,994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	171,500,000

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Balai Penyuluhan yang mendapatkan dukungan operasional pembiayaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	12 balai penyuluhan 1 Laporan	100 Persen	544,897,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	486,000,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	1 Laporan	100 Persen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26.76 % 58.9 % 26.76 % 39.14 %	40,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								1,839,289,000			1,814,744,800		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah PLKB yang dibina	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	1 Laporan 102 orang	100 Persen	126,102,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	94,744,800	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	581 Orang	100 Persen	1,713,187,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Moderen (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	1,720,000,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								1,187,237,500			1,846,335,000		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023																		
Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	21 fasilitas kesehatan 1 Laporan	100 Persen	36,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	39,650,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	11500 akseptor 11500 Orang	100 Persen	665,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	847,735,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah sarana yang tersedia	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	27 unit	100 Persen	475,137,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	938,950,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	21 faskes 1 Laporan	100 Persen	9,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	10,000,000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							414,000,000	683,235,000					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah Program KKBPK yang dilaksanakan di Kampung KB	Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	24 Kampung 2 kegiatan	23 Stakholder	414,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi) Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,76 Persen 58,90 Persen 12,40 Persen 39,14 Persen	683,235,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								2,516,709,000			1,003,986,981		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								2,500,109,000			955,986,981		
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Jumlah Kelompok yang terbentuk	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	6 Kelompok 6 kelompok	71.18 persen	19,603,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	30,000,000
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Sarana Kelompok yang tersedia	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	26 unit	71.18 persen	525,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	275,000,000

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	60 kelompok 1 Laporan	71.18 persen	168,142,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	141,489,760
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Biaya Operasional yang tersedia Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	4 kegiatan 687 orang	71.18 persen	1,585,380,000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	275,000,000
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	35 kelompok 1 Laporan	71.18 persen	184,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	154,497,221
2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah peserta Advokasi dan promosi	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	40 Orang 40 orang	71.18 persen	17,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks (1-100)) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	80,000,000
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								16,600,000				48,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai) Rata-rata usia Kawin Pertama	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah peserta promosi dan sosialisasi	persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten / kota dalam pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.15 Nilai 20 Tahun	0 Laporan 2 Laporan 80 orang	76.02 persen	16,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai) Rata-rata usia Kawin Pertama	35.15 Nilai 20 Tahun	21,000,000
TOTAL													10,077,992,425				10,197,250,807	